

DAMPAK DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA
(Studi di Desa Wisata Wanagiri dan Sambangan Sukasada Buleleng)
Oleh Gede Sandiasa*¹

Abstraksi

Besarnya kontribusi sektor pariwisata pada PDRB provinsi Bali maupun kabupaten/kota yang ada di Bali, mensyaratkan perlunya pelestarian dan pengembangan secara berkelanjutan pada sektor ini, karena bila terjadi kerusakan dan gangguan terhadap sektor ini, berpengaruh besar pada pelaksanaan pembangunan di Bali.

Penataan daerah tujuan wisata (DTW), juga menyangkut sektor pendukung, seperti sumberdaya manusia, cagar budaya, pelestarian lingkungan alamiah, yang dapat dikembangkan melalui output kebijakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, baik secara langsung dilakukan oleh pemerintah, kerjasama dengan swasta maupun upaya lain guna mendorong partisipasi masyarakat secara maksimal dalam penyusunan kebijakan pariwisata tersebut, utamanya yang menyentuh kepentingan, wilayah ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Model ini dapat mengacu pada upaya tata kelola jaringan kerjasama “*collaborative governance*”, mewujudkan sinergi antar aktor untuk menghasilkan kawasan terpadu di bidang pariwisata desa. Dalam hal ini penulis menyampaikan permasalahan yaitu proses dan dampak pengembangan desa wisata terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

Temuan penelitian adalah pengembangan pariwisata desa dikembangkan melalui inisiatif dan partisipasi masyarakat, dengan memaksimalkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan daya kreatif yang bisa dikembangkan di daerah tujuan wisata yang telah terbentuk. Kedua upaya penguatan melalui kerjasama dengan pihak swasta, Perguruan Tinggi, LSM dan pemerhati pariwisata serta lingkungan, pemberdayaan masyarakat dalam memberikan daya dukung pada Desa Wisata. Dampak yang dapat dirasakan dari pengembangan Desa Wisata adalah: Pengembangan Destinasi Wisata; b) Pengurangan urbanisasi; c) berdampak positif terhadap Pengembangan Lembaga Keuangan Desa, baik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMdes); dan d) memberi dampak pada Desa Pakraman sebagai kearifan lokal, dalam meningkatkan sektor ekonomi, sosial dan budaya.

Saran dan rekomendasi penelitian Para Pelaku wisata agar terus meningkatkan kualitas diri di bidang wisata, berkolaborasi dengan pihak swasta (pengembangan kelembagaan dan permodalan), dengan pihak perguruan tinggi (dalam pengembangan Sumberdaya manusia), meningkatkan kerjasama antar kelompok DARWIS dalam upaya membentuk Wisata Desa Terpadu, yang dapat saling bersinergi, dan membentuk jaringan wilayah pariwisata desa. Kedua, diperlukan penguatan pada Desa wisata dari Pemerintah daerah dan dinas terkait baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan desa yang dapat menaungi dan memperkuat posisi tata kelola wisata desa, dan menjadikan jaminan terhadap

keberlanjutan Destinasi wisata, keselamatan sumberdaya alam dan air, dan penguatan .

Kata Kunci: Desa Wisata, Kolaborasi, Tata kelola (*governance*) Pok Darwis.

*¹Dosen FISIP Universitas Panji Sakti

1. Pendahuluan

Pembangunan di Bali terlaksana banyak bersumber pada hasil-hasil dan tata kelola di bidang pariwisata. Hampir sebagian sumber anggaran pembangunan diperoleh melalui hasil pengelolaan pariwisata, dan dampak tidak langsung dari pengembangan pariwisata. Pendapatan ini dipungut dari pemungutan pajak akomodasi pariwisata, maupun retribusi lain yang turut mengikuti akibat perkembangan pariwisata. Hal ini didukung oleh pendapat Adi Nugroho Kepala BPS Provinsi Bali bahwa ”

Kenaikan yang signifikan berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah (PAD) beberapa wilayah di Bali. Seperti PAD Kabupaten Buleleng yang tumbuh 53,11%. Di mana pada tahun 2017 mendulang PAD Rp. 422 Miliar. Realiasi PAD tertinggi pun diraih Kabupaten Badung dengan nominal Rp. 4,17 Triliun, jumlah ini naik 17,09% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya PAD besar juga dimiliki Denpasar mencapai angka Rp. 852 Miliar dan Gianyar membukukan angka pencapaian PAD Rp. 645 Miliar, lalu PAD Rp. 429 Miliar dimiliki Tabanan bersumber pada kemajuan luar biasa dari perkembangan pariwisata (Nugroho, 2018).

Besarnya kontribusi sektor pariwisata pada PDRB provinsi maupun kabupaten/kota, mensyaratkan perlunya pelestarian dan pengembangan secara berkelanjutan pada sektor ini, karena bila terjadi kerusakan dan gangguan terhadap sektor ini, berpengaruh besar pada pelaksanaan pembangunan di Bali. Pemberdayaan pada masyarakat pelaku wisata terus dilakukan dan ditingkatkan baik dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam upaya antisipasi terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang, memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan diantaranya, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan destinasi wisata, manajemen tata kelola (*governance*) di bidang wisata, kerjasama kemitraan (kolaborasi), pemerintah

dengan swasta, antar pemerintah daerah, swasta dengan swasta, maupun dengan masyarakat, serta mengembangkan industri kreatif yang dapat mendukung perkembangan pariwisata. Pemberdayaan juga dapat diarahkan pada *help people to the help himself* menjadikan masyarakat lebih mandiri, melalui sistem pembelajaran publik, yang dilakukan secara sadar dan sukarela, dan mengembangkan kemampuannya untuk dapat memberdayakan masyarakat yang lain (Sandiasa & Widnyani, 2017).

Persoalan pengembangan kemitraan dan kerjasama, menjadi persoalan tersendiri mengingat perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh seluruh komponen pelaku di bidang pariwisata, baik dari sisi permodalan, sumberdaya manusia, maupun jejaring yang dapat dikembangkan melalui dukungan teknologi dan informasi, menyangkut tata kelola keuangan, kawasan pariwisata, marketing maupun dalam ranah kebijakan tata kelola pariwisata berbasis kemitraan “*tourism based collaborative governance*”.

Pariwisata desa dapat berkembang dengan sangat baik, karena berbagai faktor-faktor pendukung yang ada, seperti kekhasan budaya masyarakat, yang dapat menjadi sumber inspirasi dan sumber pengetahuan bagi para wisatawan pengunjung. Faktor geografi dan alam yang dapat menyajikan keindahan dan membuat terpesona bagi para pengunjung, sering juga menjadi daya wisatawan. Faktor kualitas sumberdaya manusia, juga menjadi faktor yang sangat penting, pada mereka keberlanjutan daerah kunjungan wisata dapat dipertahankan, kualitas SDM dapat membuat destinasi berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jaman, dapat menyediakan akomodasi yang representatif bagi pengunjung dan dapat menyajikan pengetahuan yang mengandung unsur kearifan lokal dengan sangat baik, yang dapat membuat para pengunjung dimanjakan dan merasa puas dan datang kembali untuk berkunjung.

Disamping faktor pendukung tentu, banyak kendala yang dihadapi untuk pengembangan pariwisata desa, antara lain, adanya berbagai kebiasaan dan budaya masyarakat yang tidak baik, seperti judi, membuang sampah dan merusak lingkungan hutan. Perubahan kondisi alam karena bencana, penebangan hutan, daerah aliran sungai yang tidak terpelihara, pola pembangunan

yang merusak tatanan alam, sehingga tidak lagi menarik untuk menjadi pengembangan wisata, volusi akibat pengembangan industri dan lain sebagainya. Kurangnya kemampuan sumberdaya manusia setempat dalam mengembang wisata desa, akibat rendahnya kualitas manusia dibidang pariwisata, misalnya dalam hal pengembangan obyek, akomodasi, penguasaan bahasa dan teknologi marketing, penyelamatan dan pelestarian lingkungan dan budaya, hal ini sesuai dengan pendapat, bahwa “Melalui pengembangan pariwisata diharapkan dapat memperkuat jati diri bangsa dan lestarnya fungsi lingkungan (Ryani & Sandiasa, 2017: 2), selanjutnya tindakan konsumerisme dan perubahan sikap serta perilaku yang mengarah pada materialisme dann kapitalisme. Tidak adanya kemampuan bekerjasama dalam pengembangan dan pemasaran desa wisata, akibat tidak memiliki permodalan yang cukup, tidak membangun jaringan baik antar desa wisata, dengan pihak swasta, dukungan pemerintah terkait dan ego sektoral. Dari sejumlah permasalahan tersebut peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana proses pengembangan desa wisata; 2) bagaimana kolaborasi dan kerjasama yang dibangun dalam pengembangan desa wisata; dan 3) bagaimana dampak desa wisata bagi masyarakat dan pengembangan lembaga.

2. Diskusi Teori

Menurut Anderson, dampak memiliki beberapa dimensi yang harus diperhitungkan, yaitu: 1) dampak masalah publik yang mengarah pada orang yang terlibat; 2) selain memberikan dampak pada kelompok sasaran mungkin juga dapat memberi efek pada kelompok di luar sasaran sebagai eksternalitas dan ekkses sebuah kebijakan; 3) kebijakan dapat memberi dampak masa kini maupun masa depan; 4) berpengaruh langsung pada pengeluaran biaya dan anggaran publik yang harus dievaluasi; dan 5) dan juga kebijakan juga dapat memberi dampak pada pengeluaran yang harus ditanggung oleh sasaran maupun masyarakat sebagai tanggungan biaya publik yang harus dikeluarkan masyarakat (Anderson, 1979).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali banyak bergantung pada pembangunan sektor ekonomi. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan di mana layanan pariwisata didasarkan pada kegiatan tradisional dan cara produksi serta eksploitasi warisan budaya yang berkelanjutan seperti arsitektur lokal, tradisi dan adat istiadat. (Líšková, *et al*, 2018: 13-15). Dengan mengembangkan kondisi aktual masyarakat dalam mendukung pembangunan, tentu akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada sisi kearifan lokal, yang sudah sangat dipahami, terealisasi dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian hidup dan cara-cara memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam pengelolaan pariwisata. Kearifan lokal merupakan jati diri masyarakat yang mengandung visi, misi dan nilai-nilai kehidupan masyarakat, sebagai tatanan yang dapat menjaga perilaku kehidupan bermasyarakat dan juga sekaligus dalam mengembangkan potensi dan menjaga kelestarian alam, untuk hidup secara berkelanjutan (Sandiasa, 2015: 7).

Pengembangan pariwisata harus selalu diupayakan untuk mendekatkan dan meningkatkan kualitas masyarakat tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang adiluhung, yang selama ini tanpa mereka sadari merupakan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat mereka. Hal ini juga didukung oleh hasil temuan berikut, bahwa: “keterlibatan masyarakat dan berlandaskan kepada *Tri Hita Karana*, dalam bidang pariwisata mendapat pengaruh positif. Hal demikian dapat dibuktikan dari banyaknya kawasan-kawasan di Bali yang dikonservasi untuk pembangunan pariwisata, mengalami perbaikan dan penataan lingkungan baik penataan tata ruang kawasan maupun infrastruktur turut serta diperbaiki, yang mengalami kemajuan sangat pesat, akibat kemajuan pariwisata (Urbanus & Febianti, 2017: 128). Berikut beberapa dampak yang dihasilkan secara positif dari perkembangan pariwisata berdasarkan hasil-hasil penelitian:

- 1) Semakin banyaknya kunjungan wisatawan dan dengan demikian pendapatan yang dihasilkan oleh obyek wisata tersebut juga akan membawa manfaat positif, yakni mendorong kemajuan ekonomi masyarakat pelaku wisata, hal ini menjadi tujuan utama pengembangan obyek wisata yakni meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup (Devy & Soemanto, 2017: 37);

- 2) Adanya dampak pengelolaan pariwisata oleh desa pakraman, terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa, berdampak pada tata kelola dan pengaturan destinasi berbasis lingkungan, hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan Desa Pakraman Sanih dan kesejahteraan masyarakat desa (Ryani & Sandiasa, 2017).
- 3) Desa dengan Konsep spasialnya menyediakan rute perjalanan wisata, sarana transportasi khusus menuju kawasan desa wisata dan fasilitas pendukung kegiatan wisata. Sedangkan konsep non spasialnya menjadikan adat istiadat menyediakan peraturan kegiatan wisata, mengembangkan kawasan desa wisata berbasis agrowisata, fasilitas penginapan berkonsep *tanean lanjheng*, toko souvenir, menyediakan fasilitas rumah makan, memberi pelatihan pada masyarakat, menyediakan tempat rekreasi, membuat web tentang kawasan desa wisata, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan dan menerapkan peraturan zonasi (Zakaria dan Suprihardjo, 2014: 245).

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif (UU No. 6 Tahun 2014). Pengembangan pariwisata didasarkan pada inisiatif penduduk lokal dengan pengaturan lokal (hukum lokal), asosiasi lokal dan klub. Pertimbangan hukum lokal dan pemerintah dipertimbangkan dalam perencanaan dan dukungan pembangunan ekonomi lokal (Toerien, 2018: 69). Selain kegiatan ekonomi, pariwisata juga merupakan cara pemecahan masalah sosial dan lingkungan. Kegiatan wisata didasarkan pada kerja sama terkoordinasi dari kelompok kepentingan lokal yang mengatur pariwisata daerah tetapi tidak membatasi jumlah wisatawan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Pengembangan Desa Wisata

Keberadaan desa wisata tidak terbentuk begitu saja, meskipun telah terdapat berbagai kondisi alam yang memungkinkan dapat dikembangkan menjadi daerah kunjungan wisata, seperti air terjun, terasering persawahan, maupun adat istiadat yang dapat dibanggakan oleh masyarakat desa setempat. Faktor sumberdaya manusia yang ada di pedesaan juga sangat penting dalam mengembangkan dan mempertahankan sumberdaya alam tersebut. Sumberdaya manusia dalam hal ini dapat diartikan sebagai potensi manusiawi penggerak eksistensi organisasi dan

potensi asset yang dapat berfungsi sebagai modal yang dapat diwujudkan sebagai potensi modal fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi (Ndraha dan Hasibuan dalam Riniwati, 2016: 1). Demikian juga pengembangan desa wisata yang terjadi di Desa Wanagiri dan Desa Sambangan, tidak terlepas dari daya kreatifitas sumberdaya manusia Desa Wanagiri dan Desa Sambangan. Di samping itu sumberdaya manusia yang memadai secara jumlah dan kualitas dapat diharapkan mampu menggali sumber-sumber pengembangan pariwisata baru, baik yang berlandaskan pada alam, warisan budaya, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Lišková, *et all* (2018), yang menyebutkan bahwa melalui kegiatan pariwisata, masyarakat dapat mengeksploitasi warisan budaya berupa tradisi dan adat-istiadat secara berkelanjutan. Dengan demikian warisan budaya tetap dapat dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan kualitasnya, serta bermanfaat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dapat menjadi sumberpengetahuan bagi para pengunjung, bahkan secara kualitas berkelanjutan dapat merubah dan mendukung tatanan kehidupan masyarakat mejadi lebih baik.

Dalam pengelolaan sumberdaya alam telah dimiliki, faktor sumberdaya manusia yang berkualitas juga menjadi sangat penting, sebab selain wisata alam yang telah ada dapat dijaga kelestariannya, juga dapat mengembangkan berkembangnya sektor lain seperti hasil pertanian, perkebunan dan air terjun sudah ada sejak dahulu, tetapi perkembangannya menjadi daerah tujuan wisata baru terjadi dan berkembang pesat, dari tahun 2014. Kegiatan pengembangan desa wisata ini menurut peneliti dapat dipilah menjadi tiga tahapan atau kegiatan, yaitu pertama, kegiatan perintisan dan penggalian potensi wisata; kedua kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan yang terakhir adalah penguatan kelembagaan pendukung wisata, kegiatan ini dapat dijelaskan sebagaimana hasil penelitian berikut ini.

a. Kegiatan Perintisan dan Penggalian Potensi Wisata Desa

Pada dasarnya, daerah tujuan wisata berkembang karena di wilayah tersebut ada daya tarik yang membuat para wisatawan untuk hadir dan menikmati

panorama wisata bersangkutan. Namun demikian jika tempat itu tidak tergali secara maksimal dan terpublikasi, serta dimungkinkan untuk dikembangkan wisata (dapat menerima orang asing ke tempat ini, tidak membahayakan para wisatawan, adanya keramahan pada penghuni disekitarnya, tata kelola yang baik, dapat mengembangkan akomodasi lainnya yang dibutuhkan). Hal yang demikian akan membuat para pengunjung untuk hadir ditempat bersangkutan secara berulang-ulang, untuk menikmati keindahan panorama alam dan perubahan daya dukung pariwisata yang semakin baik dan memanjakan para penikmat perjalanan wisata. Tatanan sosial kemasyarakatan yang mengandung unsur seni dan budaya, tata perilaku yang ramah dan sopan dari masyarakat pariwisata, termasuk perlakuannya terhadap alam pendukung yang ramah lingkungan, membuat masyarakat dan pelaku pariwisata tetap menjaga perilaku kehidupan bermasyarakat dan juga sekaligus dalam mengembangkan potensi dan menjaga kelestarian alam, untuk hidup secara berkelanjutan (Sandiasa, 2015: 7).

Daya dukung dan partisipasi masyarakat harus terus digerakkan agar pemahaman masyarakat terhadap arah desa wisata jelas, dan dapat memberikan kontribusi yang cukup, mengacu pada satu arah pembangunan desa yang sama, yaitu mendukung pariwisata desa “mampu memahami diri dan potensinya, merencanakan dan mengantisipasi kondisi perubahan ke depan” (Sumardjo, 1999 dalam Nofriansyah, 2012). Proses menggairahkan dan mendorong swadaya masyarakat dalam melakukan usaha yang selaras dengan pengembangan pariwisata desa perlu dilakukan oleh semua pihak, yang dapat memunculkan usaha-usaha kecil dan mandiri dari masyarakat, seperti souvenir, kuliner, agrowisata dan daya kreatifitas lain guna mengembangkan pariwisata, termasuk tata kelola sampah secara mandiri

b. Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Peranan lebih sangat diharapkan pada sumberdaya manusia, yang dapat mempersembahkan layanan pariwisata bermutu tinggi, sebagaimana dunia usaha pariwisata dalam menghadapi sisi persaingan (Vellas & Becherel, 2008: 216). Desa wisata adalah sesuatu yang sangat memerlukan konsentrasi dan para perintis mau bertindak sebagai relawan, karena setiap kegiatannya belum tentu dapat

memberikan hasil yang diharapkan, terutama berkaitan dengan materi dan pendapatan. Dalam upaya merintis diperlukan pemikiran dan pengorbanan, baik dari sisi waktu dan materi, guna mewujudkan sebuah karya wisata di pedesaan yang dapat menarik para wisatawan domestik maupun manca negara. Hal ini diakui oleh Kelian Desa Pakraman Wanagiri dan Ketua PokDarwis Tunjung Mekar Desa Sambangan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengaturan pengembangan kawasan pariwisata “peraturan zonasi” (Zakaria dan Suprihardjo, 2014: 245), baik menyangkut retribusi, tanggungjawab wilayah, pembinaan, dan pengembangan daya dukung masyarakat petani dan masyarakat adat sangat penting dilakukan. Di samping itu penguatan dan peningkatan kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia, juga dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga perguruan tinggi, pemerintah daerah dan para pelaku wisata atau guide-guide dari luar desa

c. Penguatan Kelembagaan Pendukung Wisata

Kesepakatan menyatukan kelembagaan yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dan pengurusan Desa Wisata menjadi sangat penting, untuk dapat menghasilkan kesatuan energi, efisiensi pengelolaan dan kesatuan pengembangan wisata secara kolektif di desa, dapat mendorong percepatan tata kelola dan pengembangan pariwisata, serta dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara kolektif, baik sebagai masyarakat adat maupun palaku pariwisata. Pembangunan desa wisata dapat merupakan pembangunan ekonomi pedesaan berlandaskan lingkungan pedesaan (Taghibi et al., 2015 dalam Hosseinzade, *et all*, 2018). Kehadiran desa wisata ini selain diharapkan menghasilkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, juga dapat didorong partisipasi dalam melaksanakan tatakelola pembangunan di desa, serta berdampak pada tata kelola dan pengaturan destinasi berbasis lingkungan, hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan Desa Pakraman (Ryani & Sandiasa, 2017) maupun pelaku wisata.

Penguatan kelembagaan pelaku pariwisata juga sangat penting, dalam hal ini kelompok Sadar Wisata. Di kedua Pokdarwis baik Pokdarwis Desa Wanagiri,

maupun Tunjung Mekar Desa Sambangan, dilakukan penguatan melalui pengesahan AD/ART Pokdarwis, agar mendapat pengakuan dan pengesahan dari lembaga terkait, terutama Dinas Pariwisata sebagai pelindung kegiatan kelompok wisata dan Bumdes dibawah pengawasan dan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng.

3.2. Dampak Pengembangan Pariwisata Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tata kelola desa wisata berbasis pada partisipasi dan daya kreatif masyarakat, dapat memberikan dampak yang signifikan, baik secara ekonomi, budaya, sosial dan peningkatan keberdayaan masyarakat. Partisipasi publik dapat menumbuhkan pembelajaran sosial “*public learning*” (Evers et al., 2016). Kondisi ini dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat di segala bidang, baik dalam perencanaan pembangunan, ekonomi dan tata hubungan sosial kemasyarakatan. Proses ini akan didahului dengan pemahaman terhadap lingkungan dan budaya sendiri, untuk dikembangkan dalam proses pembangunan desa, khususnya dibidang pariwisata. Dengan demikian pemberdayaan dapat disebut sebagai suatu proses untuk mengintegrasikan pengetahuan dan nilai penduduk lokal dengan didukung data iklim lokal, untuk membuat rencana adaptasi iklim dengan komunitas pedesaan (Crawford, *et all*, 2018: 283).

Kesempatan untuk mengelola desa dan potensinya secara mandiri, sesuai kemampuan masyarakat akan memberikan proses pembelajaran yang panjang dan mendalam, dan bertumpu pada akar budaya serta sosial masyarakat, yang menjadikan sosial budaya masyarakat makin kuat, terjaganya alam semesta, karena teknologi yang diterapkan pada tata kelola sumberdaya adalah teknologi sederhana, ramah lingkungan dan berbasis “*menyama braya*” (kekeluargaan), baik dalam membagi pekerjaan maupun hasilnya. Proses pembelajaran bagi para pengelola, dengan melibatkan kaum intelektual setempat untuk melaksanakan pemberdayaan dalam upaya mensejahterakan masyarakat (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2017:195). Adapun hasil yang diperoleh dari tata kelola Desa Wisata, baik di Desa Wanagiri dan Desa Sambangan adalah a) berkembangnya

desa wisata, b) peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi, c) pengurangan urbanisasi melalui penciptaan lapangan kerja, d) penguatan pada lembaga keuangan desa baik LPD maupun BUMDES dan berdampak pada kelembagaan kearifan lokal Desa Pakraman maupun subak di kedua desa wisata tersebut.

3.3. Faktor-faktor pendukung dan Penghambat

Dalam melaksanakan program pengembangan desa wisata, di Desa Sambangan dan Desa wanagiri, mengalami kemajuan yang sangat pesat, sejak tahun 2014, tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung maupun hambatan yang dialami baik oleh pelaku wisata maupun pada pengurus desa, baik desa dinas maupun desa pakraman. Hasil temuan menunjukkan ada beberapa faktor pendukung, yaitu 1) tersedianya sumberdaya alam pendukung pariwisata, 2) sumberdaya manusia yang dapat mengembangkan pariwisata, 3) Desa Wanagiri berdekatan dengan Daerah Wisata Bedugul, dan Gitgit dan berada pada lintasan Wisata Munduk, Gobleg dan Lovina, 4) terbentuknya pola kemitraan antar pelaku wisata dalam bentuk paket wisata, maupun pemasaran dan pelatihan.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa daya dukung sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam bentuk kegiatan swadaya gotong-royong untuk membangun sinergitas, dalam membangun keberdayaan masyarakat lokal. Pemberdayaan (kemampuan dan kemandirian) merupakan kunci dan prasyarat dari aktivitas desa membangun, maka yang menjadi pilihannya adalah pemberdayaan partisipatif (Kuswandoro, 2016). Energi swadaya lokal ini cukup memadai untuk pengembangan lebih lanjut, hanya saja perlu ditingkatkan kualitas, dan variasi layanan wisata, tata kelola SDM, sehingga lebih banyak dapat mengembangkan potensi alam dan sumberdaya sosial dan ekonomi desa, untuk menunjang keberadaan Desa Wisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi.

Selain faktor-faktor pendukung dalam penelitian ini, juga ditemukan beberapa kendala yang sudah dan harus di atasi dalam pengembangan Desa Wisata, baik di Desa Wanagiri Maupun Desa Sambangan. Ditemukan permasalahan utama dari pengembangan Desa wisata adalah kualitas sumberdaya

manusia terlatih dibidang pariwisata, baik pemandu, penyedia akomodasi, dan kuliner maupun souvenir tidak tersedia sesuai kebutuhan. Permasalahan berikutnya adalah dari sisi kelembagaan perlunya ada penguatan tentang pariwisata desa, supaya menjadi usaha yang mapan, tidak terganggu soal peraturan yang tidak jelas, sehingga menjadi hambatan yang serius dalam memotivasi dan pengembangan desa wisata. Daya dukung dan partisipasi masyarakat harus terus digerakkan agar pemahaman masyarakat terhadap arah desa wisata jelas, dan dapat memberikan kontribusi yang cukup, mengacu pada satu arah pembangunan desa yang sama, yaitu mendukung pariwisata desa “mampu memahami diri dan potensinya, merencanakan dan mengantisipasi kondisi perubahan ke depan” (Sumardjo, 1999 dalam Nofriansyah, 2012). Proses menggairahkan dan mendorong swadaya masyarakat dalam melakukan usaha yang selaras dengan pengembangan pariwisata desa perlu dilakukan oleh semua pihak, yang dapat memunculkan usaha-usaha kecil dan mandiri dari masyarakat, seperti souvenir, kuliner, agrowisata dan daya kreatifitas lain guna mengembangkan pariwisata, termasuk tata kelola sampah secara mandiri.

4. Simpulan dan Saran

4.1.Simpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis data penelitian dari pengembangan Pariwisata Desa ini dapat memberikan simpulan dan gambaran sebagai berikut:

1. Dari sisi proses pengembangan Pariwisata Desa, yaitu di Desa Wanagiri dan Desa Sambangan, berkembang melalui inisiatif dan partisipasi masyarakat, melalui upaya memaksimalkan penggalan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan daya kreatif yang bisa dikembangkan di daerah tujuan wisata yang telah terbentuk. Kegiatan untuk mewujudkan Desa Wisata dilakukan pertama, adalah kegiatan perintisan dan penggalan potensi wisata desa, pengembangan sumberdaya manusia, yang didukung oleh kelompok-kelompok Sadar Wisata, baik yang terbentuk secara mandiri setelah kesepakatan Desa Wisata terbentuk, maupun melalui kelompok-kelompok yang sudah ada secara lokal genius, seperti banjar adat/tempekan yang ada. Kegiatan ketiga adalah

Penguatan Kelembagaan Pendukung Wisata, kegiatan DARWIS yang ada diperkuat dengan AD/ART, upaya mendapat pengakuan dari Desa Adat maupun Desa Dinas, dukungan dari Subak pengguna air, advokasi terhadap dinas dan pemerintah terkait, seperti pengelola KSDA, Dinas Pariwisata, Dinas PMD, kerjasama dengan Lembaga Perkreditan Desa, dan Bumdes sebagai payung hukum dan pelaku ekonomi yang dapat menaungi dan berkerjasama secara konsisten dengan Darwis. Upaya penguatan selanjutnya kerjasama dengan pihak swasta, Perguruan Tinggi, LSM dan pemerhati pariwisata serta lingkungan, pemberdayaan masyarakat dalam memberikan daya dukung pada Desa Wisata, baik dalam pengisian SDM, materi dan daya kreatif pengembangan wisata maupun menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.

2. Dampak yang dapat dirasakan akibat pengembangan Desa Wisata adalah:
 - a) Pengembangan Destinasi Wisata, pengembangan sektor ekonomi bidang wisata semakin meningkat, hal ini dapat mendorong perkembangan secara signifikan Desa Wanagiri dan Desa Sambangan, yang dapat memberi efek ekonomi pertanian utamanya pendukung pariwisata bertumbuh dengan baik.
 - b) Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pengurangan Urbanisasi, pergerakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, menjadi motivator pengembangan sumberdaya pedesaan, terciptanya lapangan kerja ditingkat desa, melalui pengembangan pariwisata ini dapat menyerap ratusan tenaga tenaga, dengan standar kesejahteraan yang mencukupi kebutuhan ditingkat desa, juga dapat menarik sumberdaya yang memiliki kualitas sedang dibidang pendidikan dapat bekerja di sektor ini, bahkan dapat menarik kembali beberapa pelaku wisata yang sudah pernah bekerja di Denpasar untuk kembali ke desa mengembangkan Desa Wisata.
 - c) Dampak terhadap Pengembangan Lembaga Keuangan Desa, kerjasama dalam pengembangan Desa Wisata, memberi dampak positif dalam pengembangan Lembaga Keuangan Desa, baik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).
 - d) Dampak Terhadap Desa Pakraman, Desa Pakraman adalah salah satu instrumen kearifan lokal yang banyak memberi kasanah budaya, daya

kreatif, kesenian dan keindahan lingkungan maupun seni bangunan, yang dapat memberi kontribusi terhadap daya tarik wisatawan ke DTW, selain terkait dengan wisata alam maupun selfie kreatif yang dibangun masyarakat. Sebagai timbal balik dampak wisata terhadap Desa Pakraman juga memberikan pemasukan secara ekonomi, sosial dan budaya, baik yang berasal dari pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan desa pakraman, bidang pemasukan desa yang diperoleh dari pengembangan pariwisata desa, untuk membantu bidang keuangan dalam tata kelola desa pakraman, baik berupa CSR, pendapatan langsung, donatur, maupun dalam bentuk gotong royong para pelaku wisata. Himbas pengalaman dan pengetahuan, karena pengembangan wisata ini, banyak menghadirkan unsur-unsur dari luar, baik dari kalangan akademisi, dinas-dinas terkait, LSM, pramuwisata dan pihak swasta yang dapat berkontribusi langsung pada Desa Pakraman di mana destinasi wisata dikembangkan.

3. Faktor pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa Wisata. Faktor pendukungnya adalah: a) tersedianya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia pedesaan dari sisi kebutuhan pengembangan pariwisata desa; b) terbentuknya pola kemitraan antar pelaku wisata desa dengan pihak swasta dan instansi terkait, maupun perguruan tinggi; dan khusus di Desa Wanagiri merupakan daerah pelintasan paket wisata dan dekat dengan daerah wisata bedugul. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah a) sumberdaya manusia terlatih dan kualitas layanan masih perlu ditingkatkan; b) belum ada kepastian hukum terhadap perlindungan desa wisata dan c) daya dukung masyarakat masih rendah dalam pengembangan pariwisata desa.

4.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di atas, peneliti memberi saran dan rekomendasi dalam penelitian ini:

- 1) Pada Para Pelaku wisata, senantiasa terus meningkatkan kualitas diri di bidang wisata, dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta (pengembangan kelembagaan dan permodalan), dengan pihak perguruan tinggi (dalam pengembangan Sumberdaya manusia), meningkatkan kerjasama antar

- kelompok DARWIS, sehingga dapat membentuk Wisata Desa Terpadu, yang dapat saling bersinergi, dan membentuk jaringan wilayah pariwisata desa.
- 2) Pemerintah daerah dan Dinas Terkait, diperlukan penguatan pada Desa wisata baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan desa yang dapat menaungi dan memperkuat posisi tata kelola wisata desa, dan menjadikan jaminan terhadap keberlanjutan destinasi wisata, keselamatan sumberdaya alam dan air, dan penguatan .
 - 3) Bagi Desa Dinas dan Desa Pakraman, perlu memperkuat keberadaan Kelompok Wisata, dengan Peraturan Desa, Tata Kelola Keuangan satu pintu, dan upaya maksimal dalam membangkitkan sektor lain dalam mendukung wisata desa, secara manajemen, baik sumberdaya alam, agrowisata dan sumberdaya masyarakat, di sekitar DTW.

Daftar Pustaka

- Anderson, James. 1979. *Public Policy Making*. Rinehart and Winston. New York.
- Bungin, Burhan, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Prenada Media Group, Jakarta
- Bupati Buleleng, 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, 24 Pebruari 2014
- Crawford, Pat; Beyea, Wayne; Bode, Claire; Doll, Julie; Menon, Rohit, 2018. "Creating climate change adaptation plans for rural coastal communities using Deliberation with Analysis as public participation for social learning". In *The Town Planning Review; liverpool* Vol. 89, Iss. 3, (2018): 283-304.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi 4)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Deitzner, Daniel F, 1995. "Understanding and valuation Qualitative Research". Dalam *Journal of Marriage and the Family* 57. Department Sociology, Your University, Ontario Canada.
- Devy, Helln Angga dan R.B. Soemanto, 2017. "Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar". Dalam *Jurnal Sosiologi Dilema*, Vol. 32, No. 1 tahun 2017, FISIP UNS , Surakarta

- Evers, m., Jonoski, a., almoradie, A. and Lange, L, 2016. “Collaborative decision making in sustainable flood risk management: a socio-technical approach and tools for participatory governance”. In *Environmental Science and Policy*, 55, 335–44.
- Hosseinzade, Mojtaba; Jafari, Hamid; Ahmadian, Mohammad Ali, 2018. “Rural entrepreneurship and sustainable development towards environmental sustainability (Central Bardaskan City area)”. In *Ukrainian Journal of Ecology*, Vol. 8, Iss. 2, (2018): 235-245.
- Kuswandoro, Wawan Edi , 2016. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi. Dalam *Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Air Langga, Surabaya
- Líšková, Zuzana Dvořáková; Pártlová, Petra; Krogmann, Alfréd, 2018. “Multi – Level Governance Towards Regional Development In Postcommunist Countries”. In *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*; Bucharest Vol. 13, Iss. 2, (May 2018)
- Marsuki, 2005, *Metodelogi Riset*. Ekonisia FE UII, Yogyakarta
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Tarsito. Bandung.
- Nofriansyah, Deny, 2012. *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Deepublish, Yogyakarta
- Nugroho, adi, 2018. “Pariwisata Bali Melejit, Angka Pengangguran Berkurang”. Dalam *Indo post* Kamis, 10 Mei 2018. <https://www.indopos.co.id/read/2018/05/10/137541/pariwisata-bali-melejit-angka-pengangguran-berkurang>
- Riniwati, Harsuko, 2016. *Manajemen Sumberdaya Manusia, Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. UB Press, Malang
- Ryani, Desak Putu Dewi & Gede Sandiasa, 2017. “Implementasi kebijakan Desa Pakraman dalam Pengelolaan Pariwisata di Obyek wisata Air Sanih. Dalam *Locus majalah ilmiah Fisip-Unipas* (Vol. 7 No. 1 Pebruari 2017, 1-13).
- Sandiasa, Gede & Ida Ayu Putu Sri Widnyani, 2017. “Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan”, dalam *Locus majalah ilmiah Fisip-Unipas* (Vol. 8 No. 1 Agustus 2017, 64-78).
- Sandiasa, Gede, 2015. “Strategi Implementasi Kebijakan Irigasi Berbasis Kearifan Lokal” dalam Prosiding Seminar *Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, Pertanian dan Pendidikan*. P3M UNIPAS, Singaraja. Oktober 2015, 2-22

- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta IKAPI, Jakarta
- Toerien, Daan., 2018. “Power laws, demography and entrepreneurship in selected South African regions”. In *South African Journal of Science*; Pretoria Vol. 114, Iss. 5/6, (May/Jun 2018): 69-76.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Urbanus, I Nyoman dan Febianti, 2017. “Analisis dampak perkembangan pariwisata terhadap perilaku konsumtif masyarakat wilayah bali selatan”. Dalam *Jurnal kepariwisataan dan Hospitalitas*. Vo. 1 Nomor 2 Nopember 2017
- Vellas, Francois & Lionel Becherel, 2008. *Pemasaran Pariwisata Internasional Sebuah Pendekatan Strategis*. Terjemahan I Gede Ardika, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Wrihatnolo, Randy R, & Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Zakaria, Faris dan Rima Dewi Suprihardjo, 2014. “Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”. Dalam *Jurnal Teknik Pomits* Vol. 3, No.2, (2014) 2337-3520